



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI
INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

Oleh:

TITIAN NURMAULIDA

NPM. 21601081040



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN MANAJEMEN
2022**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis faktor faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Indikator variabel Nilai Informasi Laporan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dari diperoleh dengan melalui penyebaran kuesioner oleh responden yaitu kepala staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD, yang meliputi kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan daerah di Kabupaten Bima. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan daerah kabupaten bima, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan daerah kabupaten bima, Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan daerah kabupaten bima, Sistem Pengendalian Inter berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan daerah kabupaten bima.

Kata Kunci : **Nilai Informasi Laporan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian intern**

Abstract

Affect the value of regional financial reporting information. Indicator variable Value of Financial Report Information, Quality of Human Resources, Information Technology, Regional financial supervision, internal control system. The data used is primary data, which is obtained by distributing questionnaires by respondents, namely the chief of staff of the accounting/financial administration sub-section. Sampling was done using purposive sampling method. The sample of this study is the criteria for respondents in this study are employees who carry out accounting/financial administration functions at SKPD, which include the head and staff of the regional accounting/financial administration sub-section in Bima Regency. Data analysis used classical assumption test and multiple linear regression. The results of this study indicate that the variable Quality of Human Resources has a positive and significant effect on the Value of Information on Financial Statements in the Bima Regency, Utilization of Information Technology has a positive and significant effect on the Information Value of the Financial Reports in the Bima Regency, Regional Financial Supervision has a positive and significant effect on the Value of Report Information. The regional finance of the bima district, the Inter Control System has a positive and significant effect on the Information Value of the regional financial report of the bima district.

Keywords: *Value of Financial Report Information, Quality of Human Resources, Information Technology, Regional Financial Supervision, Internal Control System*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang No.32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah no.24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi (SAP).

Permasalahan mengenai laporan keuangan saat ini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya atau melemahnya sistem informasi pelaporan keuangan daerah, dan buruknya sistem pengendalian intern sehingga dapat memberikan pengaruh negative terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Permasalahan ini dibuktikan dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government governance*) dan tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah pusat maupun di daerah.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang di isyaratkan oleh peraturan perundang undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan maka akan menimbulkan permasalahan.

Fakta yang terjadi dilapngan menunjukkan bahwa hasil dari pemeriksaan Badan Keuangan (BPK) mengungkapkan 6.115 permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahnan tersebut meliputi masalah yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 3.784 permasalahn senilai Rp2,08 triliun serta peyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.331

permasalahan. Permasalahan ketidak patuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 2.525 permasalahan senilai Rp1,13 triliun, potensi kerugian sebanyak 413 senilai Rp419,60 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 846 permasalahan senilai Rp537,72 miliar. Atas permasalahan ketidak patuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindak lanjuti dengan melakukan penyetoran uang kas Negara/daerah atau penyerahan asset sebesar Rp 388,19 M. (sumber: www.bpk.go.id)

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi standar kriteria nilai informasi yang disyaratkan, diantaranya kendala dan ketepatanwaktuan. Mengingat bahwa kendala dan ketepatanwaktuan merupakan unsur utama yang paling penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengembalian keputusan, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kendala dan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor pertama yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan adalah kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut *lismawati* (2012) seorang pegawai dengan kemampuan yang baik akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin sesuai dengan batas

waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan dalam suatu organisasi. Jika kemampuan yang dimilikinya baik dan dapat mencapai target yang ditetapkan maka batasan waktu yang telah ditentukan dapat terpenuhi sehingga pelaporan keuangan dapat menjadi tepat waktu.

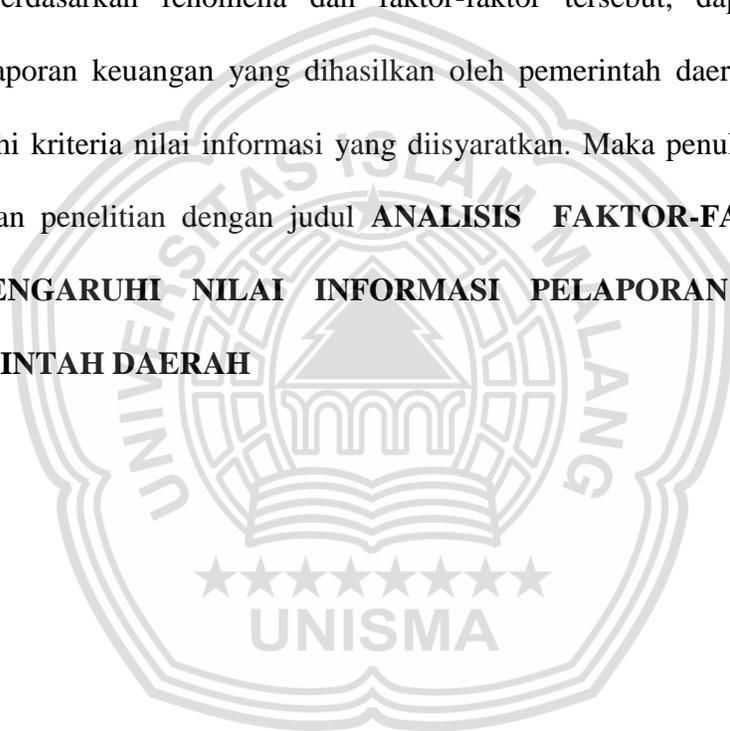
Faktor kedua yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan juga adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat diharapkan oleh pengguna TI dalam melaksanakan tugas yang tolak ukurnya berdasarkan frekuensi pengguna dan diversitas aplikasi yang dilakukan, pemakaian tersebut bisa berupa *shared database*, *spreadsheet*, *electronic data processing (EDP)*, *electronic fund transfer (EFT)*, penggunaan internet dan intranet.

Faktor ketiga yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan adalah pengawasan keuangan. Pengawasan adalah tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Sistem akan berjalan dengan baik apabila ada pengawasan yang memastikan pengawasan berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2006).

Faktor keempat yang ikut mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian intern. Pengendalian intern didefinisikan

sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan.

Berdasarkan fenomena dan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang diisyaratkan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**



1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bima?
3. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bima ?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bima

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bima Nusa Tenggara Barat.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bima ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk pengembangan terhadap akademis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademis dan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Terhadap pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat dan berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Untuk masyarakat

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan masukan dan wawasan mengenai keuangan terhadap masyarakat.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Inter terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan. Alat pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan daerah kabupaten bima
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan daerah kabupaten bima
3. Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan daerah kabupaten bima
4. Sistem Pengendalian Inter berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan daerah kabupaten bima

5.2 Keterbatasan penelitian

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.
2. Terdapat banyak variabel yang bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Inter sebagai variabel independen; serta satu variabel dependen, yaitu Nilai Informasi Laporan Keuangan. Sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variabel-variabel independen yang lain agar mampu menjelaskan informasi yang diungkapkan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya keterbatasan peneliti menerapkan metode wawancara melalui kuesioner dengan ditambahkan teknik wawancara secara

langsung, agar data dari responden akan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

2. Peneliti menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang terkait hubungannya dengan Nilai Informasi Laporan Keuangan, misalnya Pemahaman SAP, Integritas dan Ketepatanwaktuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, 1997, Mekanisme Pengawasan Apbd Di Kabupaten Sleman, Tesis, Yogyakarta
- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30
- Ariska, Dewi. 2008. Pengawasan Keuangan Daerah Di Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro
- Armando, Gerry. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi (2018) 1-10 © All Right Reserved Page 69 Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)
- Choirunnisa, A. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Dalam Meningkatkan Ketelitian Dan Keandalan Persediaan Barang Dagangan Pada CV Sinar Laut Palembang (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Darmawan, Deni. 2014. Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

- Desimiyawati. 2014. “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Study Empiris Pada SKPD Pemda Riau”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2. Hal 163-178.
- Djawang, R. R. P., Made, A., & Sari, A. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(2).
- Edy, I. C. (2009). Analisis Pengaruh Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pengangguran Di Propinsi Dati I Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Eisnis Dan Perbankan*, 17(4).
- Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Instansi Pemerintah Kota Padang. Skripsi. UNP
- Gozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Sofyan Syahri. 2012. Teori Akuntansi – Edisi Revisi 2011. Cetakan Keduabelas. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Hery. 2013. Teori Akuntansi – Suatu Pengantar. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan, Psak No. 1: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. SNA XI. Pontianak.
- Insani, I. (2010). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah Dalam Rangka Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kadir, A. Dan T. Ch. Triwahyuni. 2013. Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 No, K. P. (74). Tahun 2001, Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laudon, Kenneth C, dan Jane P. L. 2008. Sistem Informasi Manajemen; Mengelola Perusahaan Digital. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat

Lillrank, Paul. 2003. "The Quality Of Information", International Journal Of Quality & Reliability Management Vol. 20 No. 6 Pp. 691-703.

Lismawati. 2012. Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Volume: 04 No. 04, Juli-Desember 2012

Maflikhah, N. (2010). Peran Teknologi Informasi Pada Niat Untuk Mendorong Knowledge Sharing Karyawan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.

Nazier, D. (2009, July). Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan. In *Seminar Nasional*.

Nurillah, As Syifa. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Pemandagri No. 64 Tahun 2103 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Jakarta

O'Brien, James A. 2005. Pengantar Sistem Informasi Akuntansi: Pandangan Bisnis dan Manajerial, Terjemahan edisi 12. Jakarta: Salemba Empa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Nuansa Aulia.

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170.

Soekidjo Notoatmodjo. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono (2012) Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA. Suwanda, Dadang. 2015. " Factors Affecting Quality Of Local Government Financial Statements To Get Unqualified Opinion (WTP) Of Audit Board Of The Republic Of Indonesia (BPK) ". Faculty Of Economics And Business, University Of Padjajaran Bandung.

Siregar, Liper. 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Dan Transparansi Publik Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar. Tesis JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017 177 Mahasiswa Universitas Negeri Medan.

Sujarweni, Wiratna, 2015. Spss Untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

- Suparno. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan. Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
- Tuasikal, A. 2007. “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku
- U Winidyaningrum, (2010) Widyaniangrum, S., & Kurniawati, S. L. (2018). Pengaruh Sikap Keuangan, Pengetahuan Keuangan Dan Pengalaman Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga Di Sidoarjo. *Stie Perbanas*.
- Zetra, A. (2009). Strategi Pengembangan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*.